

Zaini Amin

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Musi Rawas, Jl. Watervang Kompleks LLK-UKM Lubuklinggau – 31625
 Telefon/faks: 07337329436, e-mail: zaini_amin@ymail.com

ABSTRACT

The research was conducted in Musi Rawas District. The purpose of research are to analyze: (1) concentration and market structure in the marketing of fresh fruit bunches (FFB); and (2) the influence of marketing institutions in determining the price of FFB (bargaining power). The method used is literature study on estate Agency of Musi Rawas and CPO plant operating in Musi Rawas. The data collected is the development of FFB and average price of CPO during the last 10 years and the capacity of FFB absorption of each CPO plant. The results of this research showed that: (1) the structure of the FFB market tend oligopsonistic, the market concentration by HI = 1835.92; (2) the determination of FFB prices on the basis of the price of CPO and the age of the palm oil plant is not so effective in determining a market structure towards the perfect competition; (4) the results of multiple linear regression indicated that price is influenced by FFB prices at the level of middlemen and CPO prices simultaneously; (5) regression coefficient showed b1 and b2 <1, which means that markets tend oligopsonistic. Circumstances which farmers position as price taker.

Keyword : marketing of fresh fruit bunches (FFB), Musi Rawas

LATAR BELAKANG

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang banyak diusahakan masyarakat. Dengan produk turunan yang beragam, maka komoditas ini perluasannya sangat signifikan dalam memenuhi permintaan Dunia yang terus meningkat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan (2013), minyak CPO (*crued palm oil*) menempati urutan pertama dalam ekspor di tahun 2012, yaitu sebesar 23.521.071 ton. Namun demikian, dengan ekspor yang besar itu, Indonesia baru menikmati ekspor produk utama CPO, belum menikmati turunan produk lainnya. Sebaliknya, disektor *farming* dengan luas penguasaan lahan yang relatif kecil (rata-rata 2 ha) hanya menarik keuntungan dari penjualan tanda buah segar yang harganya berfluktuasi, karena dipengaruhi struktur pasar dan sangat sensitif dengan perkembangan ekonomi global. Amin (2004) menjelaskan bahwa dengan struktur pasar yang menempatkan petani pada posisi penerima harga dan kondisi harga yang dipengaruhi kondisi ekonomi global, maka sulit bagi petani meningkatkan kesejahteraannya. Bertitik tolak dari permasalahan ini, maka penelitian mengenai struktur dan konsentrasi pasar dalam pemasaran tandan buah segar kelapa sawit menarik untuk diteliti.

Sentra kelapa sawit di Indonesia terdapat di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa salah satu provinsi di Sumatera yang banyak mengusahakan Kelapa Sawit adalah Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas pertanaman 828.114 ha, dan pada tahun 2012, daerah ini mampu memproduksi CPO sebesar 2.242.649 ton (Pusat Data dan Informasi Pertanian, 2013). Usaha Kelapa Sawit dimaksud tersebar di beberapa Kabupaten, dan satu di antaranya terdapat di Kabupaten Musi Rawas. Menurut Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas

(2012) Luas Tanam kelapa sawit menunjukkan perkembangan yang signifikan

Tabel 1. Luas Tanam dan Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 – 2012

No.	Tahun	Luas Tanam (ha)	Produksi TBS (ton)
1.	2009	57.331,77	500.353,03
2.	2010	58.984,30	556.228.03
3.	2011	110.120,85	896.279,98

Sumber: Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012

Tabel 1 menunjukan bahwa dalam tiga tahun terakhir luas tanam Kelapa Sawit menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Tahun 2009 Luas Tanaman 57.331 ha., lalu pada tahun 2010 mencapai 58.984,30 ha., kemudian mengalami lonjakan mendekati 100 % pada Tahun 2011 yaitu 110.120, 85 ha. Walaupun peningkatan tersebut tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan produksi tandan buah segar, namun peningkatan ini mengindikasikan begitu banyak masyarakat yang tertarik untuk mengusahakan komoditas ini.

Sebagian besar perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Musi Rawas adalah perkebunan rakyat dengan pola usaha inti – plasma atau non inti – plasma. Di Kabupaten Musi Rawas, terdapat enam perusahaan pengolahan CPO yang membutuhkan TBS. Sumber bahan baku berupa TBS tersebut yang masuk perusahaan tersebut berasal dari kebun inti, petani plasma dan petani di luar plasma. Petani yang mengusahakan sawit tersebar di 21 kecamatan dan 277 desa dan kelurahan di Kabupaten Musi Rawas dan diusahakan oleh banyak petani, dengan penguasaan lahan rata – rata 2 ha (Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas (2013). Kondisi ini tentunya sangat mempengaruhi konsentrasi pasar TBS

itu sendiri. Hasil penelitian Amin (2004) menunjukkan bahwa adanya konsentrasi pasar dalam sistem agroindustri telah menyebabkan struktur pasar yang tidak sempurna dan menempatkan petani pada posisi penerima harga. Hal yang sama dikemukakan Sukirno (1997) bahwa struktur pasar yang tidak sempurna harga produsen lebih rendah dari harga pada struktur pasar output yang sempurna. Temuan Wohlgenant dan Piggot (2003) menunjukkan pada struktur pasar persaingan sempurna, masing-masing lembaga pemasaran mempunyai *market power* yang sama dan nilai produksi dipengaruhi oleh input. Hal yang sama terjadi dalam penelitian struktur pasar tomat di Taiwan yang dilakukan oleh Shu dan Sexton (1996). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menempatkan petani sebagai penerima harga dalam hubungan distribusi bahan baku dari petani ke perusahaan agroindustri adalah karena bahan baku tomat bersumber dari petani yang jumlahnya banyak dengan rata-rata penguasaan lahan 0,27 ha. Selain itu menurut Amin (2004) bahwa dengan konsentrasi pasar dan berkembangnya struktur pasar yang tidak sempurna memungkinkan: (1) adanya perjanjian antar pedagang dan antar pabrik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil penelitian petani menyatakan bahwa antar pedagang perantara dan antar pabrik terdapat kesepakatan mengenai penetapan harga bahan baku; dan (2) pengusaha/pemilik pabrik mempunyai lahan inti untuk menyediakan bahan baku kebutuhannya. Keadaan ini memberikan peluang bagi pengusaha untuk tidak menerima suplai bahan baku dari petani di saat harga bahan baku meningkat, sehingga harga turun kembali. Penyediaan bahan baku dari lahan inti ini menyebabkan terjadinya integrasi vertikal yang dilakukan oleh pengusaha, yaitu dengan menguasai produk dalam suatu rangkaian produksi dari penyediaan bahan baku sampai pengolahan. Akibatnya akan membuat *barier* bagi petani dalam memasarkan produk bawang merah untuk menyediakan bahan baku bagi pabrik. Struktur pasar seperti ini secara logis sangat merugikan petani, karena *marketshare* yang diterima petani paling kecil dibandingkan dengan pelaku pasar lainnya, pada beban resiko yang paling besar ada pada petani.

Secara umum penguasaan produk dalam suatu rangkaian produksi dapat terjadi dalam kebijakan pemasaran di Indonesia, mulai dari kebijakan *konglomerasi*, sampai kepada kebijakan melalui pendekatan perusahaan inti, perusahaan pengelola, dan perusahaan penghela. Untuk melindungi masyarakat dalam praktik – praktik yang membuat terjadinya *barier* pasar dalam kebijakan – kebijakan tersebut Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU Nomor 5 Tahun 1999 ini berlakuk untuk semua perusahaan di Indonesia, kecuali perusahaan skala kecil dan perusahaan berbentuk Koperasi. Namun demikian sebaik apapun kebijakan, tanpa adanya pengawasan pemerintah, maka kebijakan tersebut tidak akan membantu meningkatkan daya saing petani dan bahkan akan cenderung menciptakan konsentrasi pasar yang menempatkan posisi petani sebagai

penerima *marketshare* terendah. Seperti yang dijelaskan oleh Yasmi, Achmad dan Deliarnov (1996) bahwa dalam pola usaha inti – plasma petani plasma diuntungkan dengan kepastian harga, namun jika harga meningkat mereka tidak dapat menarik keuntungan yang lebih baik dari petani nonplasma, karena mereka terikat dengan perjanjian untuk menjual TBS ke perusahaan mitranya. Lain halnya dengan petani nonplasma, mereka bebas memasarkan hasilnya ke perusahaan yang harganya lebih menguntungkan. Temuan yang sama dikemukakan Rahayu, Setyowati, Sugihardjo dan Darsono (1996) bahwa petani Jambu Mete yang terikat dengan perjanjian kemitraan tidak terlalu diuntungkan ketika kenaikan harga Jambu Mete secara signifikan dibandingkan dengan petani yang tidak terikat dalam perjanjian kemitraan. Akan tetapi, petani yang tidak terikat dengan kemitraan tidak mendapat kepastian harga dibandingkan dengan petani yang terikat dalam kemitraan.

Salah satu perwujudan pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan , adalah sebagai fasilitator dalam penetapan harga. Khusus untuk pemasaran CPO, upaya yang dilakukan adalah penetapan harga TBS yang didasarkan kepada harga CPO, harga Inti Sawit dan umur tanaman. Dengan upaya ini diharapkan harga TBS yang diterima petani akan berada di atas harga monopoli, walaupun karena kebijakan pola inti-plasma menyebabkan terjadi konsentrasi pasar yang berujung pada pasar persaingan tidak sempurna. Untuk kepentingan itulah, penelitian ini dilakukan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, timbul pertanyaan, apakah kebijakan tersebut mampu menciptakan konsentrasi dan struktur pasar yang menempatkan petani pada posisi tawar yang kuat, dan bagaimana pengaruh lembaga-lembaga pemasaran dalam menentukan harga TBS (posisi tawar petani kelapa sawit). Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) konsentrasi dan struktur pasar dalam pemasaran TBS., dan (2) pengaruh lembaga – lembaga pemasaran dalam menentukan harga TBS (posisi tawar petani kelapa sawit)

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Untuk mengkaji dan mengungkapkan konsentrasi dan struktur pasar TBS dalam penelitian ini dilakukan terhadap dua objek penelitian, yaitu:

1. Manajer Pabrik CPO
2. Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, yang memiliki data perkembangan harga TBS lima Tahun terakhir

Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan data bulanan selama lima tahun berturut-turut (2007-2011) yang tersedia di Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dan rata-rata pasokan TBS selama lima tahun di 5 Pabrik CPO yang beroperasi di Kabupaten Musi Rawas.

SOCIETA III - 2 : 83 – 88, Desember 2014

Variabel dan Operasional Variabel

Untuk menjelaskan bagaimana mengukur variable penelitian dan mengumpulkan datanya, berikut dijelaskan variable-variabel penelitian.

- 1) Struktur Pasar diukur melalui Herfindal-Hirschman Index (HHI) yang menunjukkan konsentrasi pembelian TBS
- 2) Posisi tawar petani adalah kemampuan petani dalam menentukan harga TBS yang diterimanya (PX_1) yang diindikasikan oleh nilai koefisien harga di masing-masing tingkat pemasaran
- 3) Tingkat harga TBS adalah nilai jual (Rp./kilogram TBS) dari petani ke pedagang perantara dan dari pedagang perantara ke pabrik

Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Analisis

Pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan dokumen yang tersedia di Dinas Perkebunan dan pabrik CPO. Data yang dikumpulkan meliputi perkembangan luas dan produksi Kelapa Sawit, perkembangan rata-rata harga TBS di tingkat petani, perkembangan rata-rata harga TBS di tingkat pedagang perantara yang di *crosscheck* dengan harga TBS di pabrik CPO, perkembangan harga rata-rata CPO, dan kapasitas pabrik dalam penyerapan hasil TBS petani.

Untuk keperluan analisis, terdapat perbedaan dasar dalam operasional variable, yang mengharuskan adanya perbedaan dalam metode analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode analisis data dilakukan sebagai berikut:

1. Struktur Pasar

Seperti dijelaskan di atas struktur pasar ditunjukkan oleh konsentrasi pasar yang dihitung melalui Herfindahl Index (HI) dengan rumus (Hanaford, 2004):

$$HI = \sum_{i=1}^n S_n^2$$

Sebagai keterangan:

HI = Herfindal Index

S^2 = Persentase *Market Share* Industri/Pabrik yang beroperasi

n = Jumlah Pangsa pasar yang terbesar

Jika nilai HI = 100 % maka nilai $S_1^2 = 10.000$, artinya telah terjadi struktur pasar monopsoni, jika 5000 – 6250 maka struktur pasar oligopsoni, jika < 5000 maka struktur pasar cenderung menghadapi persaingan sempurna dan jika > 6250 maka struktur pasar cenderung monopsoni.

2. Posisi Tawar

Di dalam hipotesis terdapat satu peubah tak bebas, yaitu tingkat harga TBS yang diterima petani sawit, dan tiga peubah tak bebas. Peubah-peubah tersebut menunjukkan hubungan harga yang diterima petani dengan harga di tingkat pemasaran yang lain. Karena itu pada hipotesis ini, model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda melalui persamaan berikut (Sudiyono, 2001):

$$X_1 = a + b_1X_1 + b_2S_F$$

Sebagai keterangan lanjut adalah:

X_1 = harga TBS di tingkat petani

X_2 = harga TBS di tingkat pedagang perantara

S_F = harga CPO di tingkat prosesor.

Dari koefisien regresi dapat dibaca hubungan antara pelaku pasar, yaitu (Sudiyono, 2001):

- a. Jika $b > 1$, maka terjadi monopoli dari lembaga pemasar ke X terhadap lembaga pemasaran f.
- b. Jika $b = 1$, maka proses pasar berada dalam persaingan sempurna.
- c. Jika $b < 1$, maka terjadi monopsoni lembaga pemasaran ke X terhadap lembaga pemasaran f.

Untuk menguji hubungan harga di tingkat petani dengan harga di tingkat pedagang pengumpul, pedagang pengecer dan prosesor secara parsial digunakan "uji t Student" tidak berpasangan dengan menggunakan program "SPSS for window".

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas, dan dilaksanakan pada September 2012 sampai dengan November 2012.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsentrasi dan Struktur Pasar

Untuk mengetahui struktur pasar dilakukan melalui perhitungan *Herfindahl Index (HI)*. Dari temuan di lapangan ternyata terdapat 5 perusahaan/pabrik CPO yang beroperasi di Kabupaten Musi Rawas, yang masing-masing mempunyai pasokan bahan baku (TBS) seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa ada tiga perusahaan terbesar dalam pasokan bahan baku berupa TBS, yaitu: PT. Lonsum dengan $S_1^2 = 742,18$, kemudian PT. Juanda Sawit dengan $S_2^2 = 351,56$, dan PT. Dandi Maker Indah Lestari dengan nilai $S_3^2 = 742,18$. Jika ketiga nilai kuadrat perusahaan terbesar dalam menguasai pasokan TBS tersebut dijumlahkan akan menghasilkan *Herfindahl Index (HI)* sebesar 1.835,92. Angka ini menunjukkan bahwa dalam pemasaran bahan baku, struktur pasar masih mendekati persaingan oligopsoni. Seperti yang dijelaskan Hanaford (2004) bahwa dengan memakai alat ukur *herfindal Index (H index)*, bahwa jika nilai HI = 100 % maka nilai $S_1^2 = 10.000$, artinya telah terjadi struktur pasar monopsoni, jika HI = 5000 – 6250 maka struktur pasar oligopsoni, jika HI < 5000 maka struktur pasar cenderung menghadapi persaingan oligopsoni, jika HI > 6250 maka struktur pasar cenderung monopsoni, dan jika HI mendekati 0, maka struktur pasar cenderung sempurna.

Tabel 2. Pasokan TBS untuk Masing-masing Unit Pabrik CPO di Kabupaten Musi Rawas

No.	Perusahaan/Pabrik CPO	Jumlah Pasokan (ton)	Persentase (S)	S ²
1.	PT. London Sumatera (Lonsum)			
	- PT. Lonsum Muara Lakitan	60	18,75	351,56
	- PT. Belani Bingin Teluk	60	18,75	351,56
	- PT. Gunung Bais Estate Terawas	20	6,25	39,06
Jumlah		140	43,75	742,18
2.	PT. Juanda Sawit	60	18,75	351,56
3.	PT. Bina Saint	30	9,37	87,89
4.	PT. Dandi Maker Indah Lestari	60	18,75	351,56
5.	PT. Hasil Musi Lestari	30	9,38	87,89

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, 2012

Dari nilai HI di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pengendalian dalam pemasaran TBS yang dilakukan pemerintah daerah belum begitu efektif, karena hanya berdasarkan perhitungan harga CPO dan minyak Inti Sawit. Kondisi ini menempatkan pembeli TBS (pabrik CPO) untuk bertindak sebagai *price setter* dan petani kelapa sawit bertindak sebagai *price taker*. Secara logis peluang terjadinya kondisi ini sangat besar, karena petani yang jumlahnya banyak dengan skala usaha yang relative kecil, dilihat dari kemampuan permodalan dan kapasitas kelembagaan belum mampu mengolah TBS sendiri, sehingga harus menjual ke pabrik CPO yang jumlahnya hanya 5 perusahaan. Keadaan ini memicu penjualan yang kompetitif menghadapi pembeli yang cenderung oligopsonis. Kondisi ini adalah salah satu struktur pasar yang tidak sempurna yang disebabkan oleh: (1) permodalan yang begitu kuat dari pihak swasta, sehingga pemerintah memerlukan investasi untuk mendorong aktivitas agribisnis kelapa sawit yang mampu menciptakan *multiplier effect* dalam usahatani kelapa sawit di antaranya, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi; dan (2) penguasaan teknologi. Seperti juga yang dikemukakan Hasibuan (2000) bahwa perkembangan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar, serta berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, dalam penelitian ini mengindikasikan munculnya akumulasi modal dan kekayaan di tangan beberapa kelompok pengusaha pabrik CPO menyulitkan perusahaan lain untuk masuk pasar.

Lalu seberapa jauh kemampuan lembaga yang terlibat dalam distribusi TBS di petani Kelapa Sawit berperan sebagai penentu harga ?. Untuk itu diperlukan analisis lebih lanjut.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Posisi Tawar Petani (Farmer Bargaining Power)

Untuk mengetahui posisi tawar petani dilakukan dengan pendekatan model regresi linier berganda hubungan harga TBS di tingkat petani dengan harga TBS di tingkat pedagang perantara dan harga CPO (di tingkat pabrik). Dari hasil perhitungan (Tabel 3) menunjukkan bahwa koefisien determinan (R²) = 0,963 menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel yang dipasang dalam model hanya mampu menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga TBS di tingkat petani adalah 97 %

dan sisanya dikendalikan variabel di luar model. Karena itu model yang diperlukan untuk melihat posisi tawar petani dan struktur pasar dianggap cukup.

Selanjutnya dari hasil uji statisti itu juga menunjukkan bahwa simultan menunjukkan bahwa nilai signifikan F = 0,000. Ini berarti bahwa secara simultan harga TBS di tingkat pedagang perantara, dan harga CPO berpengaruh sangat nyata dengan harga TBS di tingkat petani. Selajutnya melalui uji secara parsial, variabel harga TBS di tingkat pedagang perantara mempunyai nilai t = 0,815, sedangkan pada variable harga CPO nilai t = 0,000. Dengan demikian, melalui uji parsial hanya variable CPO yang berpengaruh sangat nyata terhadap harga TBS di tingkat petani.

Dari perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 3, maka diperoleh model persamaan linier berganda seperti di bawah ini.

$$X_1 = 20,652 - 0,0004 X_2 + 0,126 S_F$$

Persamaan linier di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien (b₁ = - 0,0004 < 1) dan nilai koefisien (b₂ = 0,126 < 1). Nilai koefisien ini menurut Sudiyono (2001) bahwa terjadi kecenderungan oligopsonis lembaga pemasaran X₂ (pedagang perantara) dan lembaga pemasaran S_F (pengolah hasil) terhadap lembaga pemasaran X₁. Dengan demikian, petani produsen TBS menghadapi harga yang oligopsonis di sisi hilir. Selain itu dari koefisien b₁ = - 0,0004 dan b₂ = 0,126, mengindikasikan bahwa kenaikan harga CPO sebesar Rp. 1,00,- akan menyebabkan penurunan harga TBS di tingkat petani sebesar Rp. 0,9996 kelapa sawit. Namun demikian, dilihat di sisi harga TBS tingkat pedagang pengumpul, kenaikan harga CPO sebesar Rp. 1,00,- akan meningkatkan harga TBS di tingkat petani sebesar Rp. 1,125,-.

Bertitik tolak dari makna persamaan regresi linier di atas, maka dalam struktur pasar yang cenderung oligopsoni, petani kelapa sawit menjual TBS dengan harga yang lebih rendah dari harga yang harus dibayar pembeli bila berhadapan dengan struktur pasar yang kompetitif. Untuk memahami hal tersebut, perlu untuk dicermati perkembangan harga TBS dan CPO 10 tahun terakhir (Tabel 4).

Dari Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa bahwa jika harga TBS menghadapi harga kompetitif, maka kenaikan harga CPO dari Rp. 4.173,10,- menjadi Rp. 4.389,75 (P_{X1}) akan meningkatkan harga TBS di tingkat menjadi Rp. 727,31,- (P_{X1.1}) dan harga

TBS di tingkat pedagang perantara menjadi Rp. 1.108,37,- ($P_{X2.1}$). Namun demikian pada kenyataannya dalam pasar yang cenderung oligopsonistik, kenaikan harga CPO Rp. 4.389,75 tersebut hanya meningkatkan harga TBS di tingkat petani Rp. 544,14 ($P_{X1.2}$) dan meningkatkan harga TBS di tingkat pedagang pengumpul Rp. 942,36 ($P_{X2.2}$). Ini artinya, bahwa harga TBS yang diterima petani kelapa sawit dan pedagang perantara lebih rendah dibandingkan dengan harga TBS yang berada pada pasar kompetitif, selain karena posisi tawar dari pedagang perantara lebih tinggi dari

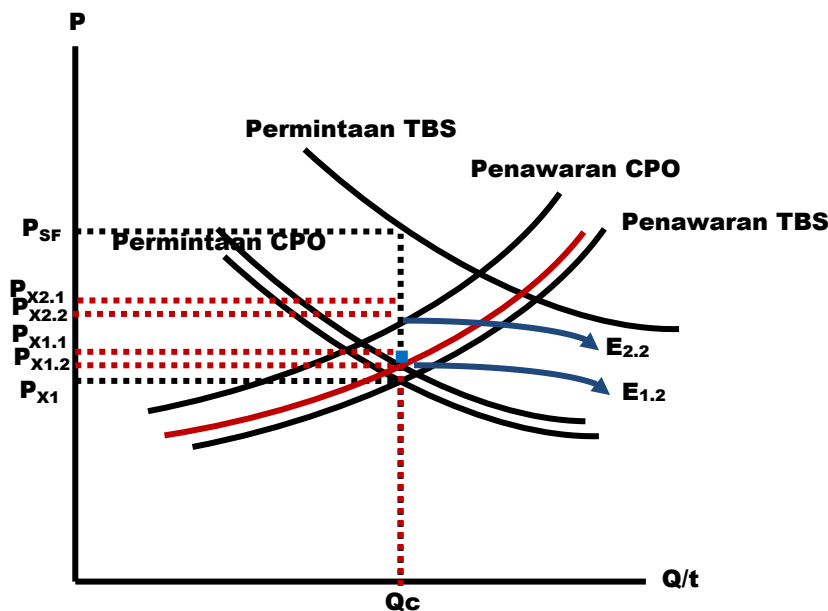
petani, maka memberi pengaruh negatif terhadap harga di tingkat petani (Gambar 1). Temuan ini mengindikasikan bahwa petani dengan posisi tawar yang paling lemah akan menerima margin pemasaran yang paling rendah dibandingkan dengan lembaga yang terlibat dalam pemasaran kelapa sawit lainnya. Ini artinya, bahwa kebijakan penetapan harga TBS yang dilakukan pemerintah berdasarkan pada umur tanaman dan harga CPO belum efektif untuk melindungi petani sebagai aktor sentral dalam agribisnis kelapa sawit dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Uji – t Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga TBS di Tingkat Petani

Model	Unstandardized coefficient		Standardized of coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (constant)	20,652	41,352	-	0,499	0,629
2. X_2	-3,04E02	0,126	-0,045	-0,241	0,815
3. S_f	0,126	0,023	1,024	5,441	0,000

Tabel 4. Perkembangan harga TBS di Tingkat Petani dan di Tingkat Petani, serta Harga CPO di Tingkat Pabrik

Bulan	Rata-rata Harga (Rp./kg) di Tingkat Petani (X_1)	Rata-rata Harga (Rp.) di Tingkat Pengumpul (X_2)	Rata-rata Harga (Rp./kg) CPO (S_f)
Januari	510,66	892,32	4.173,10
Februari	544,14	942,36	4.389,75
Maret	563,97	968,20	4.570,70
April	583,67	977,90	4.720,75
Mei	600,54	1.003,34	4.830,60
Juni	599,01	1.005,97	4.923,99
Juli	588,62	980,96	4.744,21
Agustus	570,14	942,21	4.611,78
September	581,43	962,43	4.643,34
Oktober	570,01	946,52	4.527,53
November	533,93	877,58	4.287,87
Desember	552,52	915,72	4.448,60



Gambar 1. Penetapan harga pada Pasar oligopsoni

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti berikut:

1. Tingkat keuntungan usahatani secara simultan dipengaruhi ($\alpha = 0,05$) oleh luas lahan, harga input variabel, biaya tenaga kerja, dan biaya input tetap. Namun melalui uji parsial, tingkat keuntungan secara signifikan dipengaruhi oleh luas lahan ($\alpha = 0,05$) dengan $E = 6,4798$, harga pestisida ($\alpha = 0,01$) dengan $E = 0,6343$, dan biaya tenaga kerja ($\alpha = 0,05$) dengan $E = 0$.
2. Kuantitas permintaan input bibit bawang merah secara dominan dipengaruhi oleh skala usahatani ($E = 5.4798$), harga bibit itu sendiri ($E = 1,6020$). Kemudian, kuantitas penawaran output bawang merah secara dominan dipengaruhi oleh harga output (bawang merah) itu sendiri ($E = 4,1947$), luas lahan ($E = 5,4789$), dan input bibit ($E = -1,8020$)
3. Dilihat dari elastisitas tenaga kerja ($E = 0$), penambahan tenaga kerja pada usahatani bawang merah tidak akan meningkatkan kuantitas penawaran output. Artinya, pada saat ini usahatani bawang merah tidak mampu lagi menyerap tenaga kerja.

Saran-saran

Dari kesimpulan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keuntungan, diperlukan perluasan lahan garapan, pengurangan penggunaan pestisida dengan mengutamakan sistem pengendalian hama terpadu, pengurangan tenaga kerja, pengendalian harga input dengan mengusahakan bibit sendiri, dan pengendalian harga output agar tetap tinggi dengan mengatur pola tanam dan pola distribusi
2. Perlu adanya pengalihan tenaga kerja dengan menumbuhkan sektor non pertanian yang mempunyai kaitan dengan sektor non pertanian, terutama industri perdesaan yang berbasis bahan baku lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Z. 2004. Keterkaitan antar Subsistem dari Sistem Agribisnis Bawang Merah di Wilayah Cirebon. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas. 2012. Laporan Tahunan Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Muara Belitih.
- Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas. 2012. Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2007 – 2011. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Muara Beliti.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2012. Nilai Ekspor Hasil Perkebunan 2011. Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.
- Hannaford, S. 2004. The Latest Maneuvers of New Oligopolies and What They Mean. [Http://www.oligopolywatch.com](http://www.oligopolywatch.com).
- Nazir, M. 1999. Metode Penelitian. Penerbit P.T. Ghalia Indonesia Anggota Ikapi, Jakarta.
- Hasibuan, N. 2000. Konsentrasi Industri yang Menindasi. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Pusat Data dan Informasi Pertanian. 2012. Statistik Pertanian Tahun 2009 – 2011. Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.
- Rahayu, E.S., R. Setyowati, Sugihardjo, dan Darsono. 1996. Kajian Keragaan Pasar dan Prospek Daya Saing Jambu Mete. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dalam Rangka Kongres XI dan Konferensi XII Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Denpasar 9 – 12 Agustus 1996.
- Sadono Sukirno. 1997. Pengantar Teori Mikroekonomi. Manajemen PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Shu, Y and R.J. Sexton. 1996. Measuring Return to An Innovation in An Imperfectly Competitive Market: Application to Mechanical Harvesting of Processing Tomatoes in Taiwan. American Journal Agricultural Economics Vol. 78. Copyright American Agricultural Economics Assosiation.
- Sudiyono, A. 2001. Pemasaran Pertanian. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Yasmi, Achmad dan Deliarnov. 1996. Yasmi, A. Z. F., M. Ahmad, dan Deliarnov. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Pertanian dalam Usahatani Kelapa Sawit. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dalam Rangka Kongres XI dan Konferensi XII Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Denpasar 9 – 12 Agustus 1996.